

BAB I

Memaknai Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok dalam Geopolitik di Indo-Pasifik

RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini

A. Persaingan Antarnegara

Rivalitas antarkekuatan besar dalam politik internasional telah terjadi sejak lama, bahkan ratusan tahun sebelum Masehi. Kekaisaran Persia yang sekarang menjadi Iran, telah menjadi adikuasa pertama di dunia dan menguasai kawasan Timur Tengah, mulai dari Turki hingga Afghanistan. Kekaisaran Persia berkonflik dengan Yunani sejak tahun 547 Sebelum Masehi (SM), dan menundukkan negara kota Yunani serta menggantikan pemerintahannya dengan yang loyal terhadap Persia.

Persaingan antarnegara besar ini terus berlanjut hingga masa kekaisaran Roma yang menundukkan Carthagera dan menguasai

RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: emilia.yustiningrum@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Yustiningrum, RR., E. & Prihatini, E. S. (2026). Memaknai Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok Dalam Geopolitik di Indo-Pasifik. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (1–27). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1718
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

kawasan Mediterania pada kisaran tahun 509 SM melalui Perang Punic dan Perang Makedonia. Roma terus berkuasa hingga seribu tahun pertama Masehi. Pada abad pertengahan, Republik Venesia menjadi negara adikuasa di kawasan Mediterania melawan Kekaisaran Byzantium, Genoa, dan Milan, yang kekuasaannya mencapai Afrika Utara dan Laut Hitam hingga tahun 1500-an Masehi. Pada abad ke-17 muncul persaingan antara Belanda melawan Spanyol untuk memperebutkan sumber rempah-rempah di mana Belanda menguasai lautan dari Afrika Selatan hingga Asia Tenggara, sementara Spanyol menundukkan kawasan Amerika Selatan. Namun, pada abad ke-19, Inggris melampaui Belanda sebagai negara terkaya di dunia yang menguasai lautan hingga sekarang. Pada saat yang sama, Prancis juga muncul sebagai kekuatan dunia pada abad ke-19 walaupun bisa dikalahkan oleh Inggris.

Pada awal abad ke-20, Jerman muncul sebagai kekuatan dunia hingga pecahnya Perang Dunia I. Amerika Serikat (AS) belum menjadi kekuatan dunia hingga Jepang menyerang Pearl Harbour yang menjadi pemicu munculnya Perang Dunia II pada tahun 1941. AS yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 mengakhiri Perang Dunia II. Pasca-1945, dimulailah Perang Dingin antara AS melawan Uni Soviet yang diwarnai dengan pecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur serta terbelahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Runtuhnya Rusia pada akhir tahun 1990 menjadikan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa dalam politik internasional. Namun demikian, Federasi Rusia hadir sebagai kekuatan dunia yang baru, meskipun pecahan-pecahan wilayahnya telah berdiri sebagai negara merdeka melalui *Commonwealth of Independent States* (CIS).

Kini, tantangan utama AS dalam politik internasional adalah kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan besar. Keunggulan AS dan Tiongkok terlihat jelas dalam kekuatan ekonomi dan militer. Pada 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) AS mencapai \$21,4 triliun dan Tiongkok \$14,1 triliun, sementara Jepang di posisi ketiga dengan \$5,2 triliun. Dalam hal belanja militer, AS memimpin dengan \$643

miliar, diikuti oleh Tiongkok \$168 miliar, Arab Saudi \$82,9 miliar, dan Jepang \$46,6 miliar (Kydd, 2020, 855). Berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per April 2025, ekonomi Tiongkok telah melampaui AS dengan nilai 40.720 sementara AS 30.510 (IMF, 2025) sehingga meskipun masih tertinggal di belanja militer, pertumbuhan ekonominya yang pesat menjadikan Tiongkok sangat berpeluang menggantikan AS sebagai negara paling kuat.

Rivalitas yang bersumber kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang spektakuler sejak 30 tahun terakhir kerap disebut sebagai “Perang Dingin versi baru” atau “Perang Dingin 2.0” (Brands & Gaddis, 2021; Steen, 2025; Westad, 2019). Bedanya sekarang, AS menghadapi Tiongkok yang ekonominya jauh lebih kuat daripada Uni Soviet sehingga Perang Dingin 2.0 ini sangat ditentukan oleh performa ekonomi Tiongkok menghadapi beberapa tantangan, seperti populasi yang menua, alokasi modal yang terlalu fokus ke properti, dan krisis energi (Dollar, 2025). Rivalitas AS dan Tiongkok juga berbeda dari kompetisi antara AS dan Uni Soviet. Tak seperti Uni Soviet kala itu yang tidak memiliki kontak dagang dan sosial dengan AS, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang terbesar AS dan hampir 200.000 mahasiswa Tiongkok berkuliah di AS (Roberts & Bano, 2023, 25). Selain itu, sekarang negara-negara *middle power* bisa menolak desakan untuk memilih antara AS atau Tiongkok dengan cara mengadopsi berbagai bentuk kebijakan *hedging*, di antaranya pendekatan multipolaritas di kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara *middle power* tidak selalu memandang serta merespons persaingan AS dan Tiongkok sebagai adu kuat antara demokrasi liberal dan autokrasi, justru mereka memainkan langkah strategis berada di tengah dua negara terkuat di dunia (Chan & Lee, 2024).

Tiongkok telah berkuasa sebagai kekuatan besar selama 2.000 tahun melalui berbagai dinasti, yaitu Qin, Han, Xin, Jin, Sui, Tang, Song, Liao, Jin, Yuan, Ming, and Qing. Tiongkok berubah menjadi republik ketika Mao Zedong mendirikan Partai Komunis China pada tahun 1949. Hingga Mao Zedong wafat pada tahun 1976, penggantinya, Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi mulai tahun 1978

dengan membuka Tiongkok terhadap ekonomi pasar. Tiongkok mengalami perkembangan ekonomi pesat sejak Deng Xiaoping, yang berlanjut pada masa Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping tahun 2013. Pada tahun 2013 ini, Xi Jinping mulai memperkenalkan kebijakan luar negeri Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk menghubungkan kawasan Asia Pasifik melalui koridor jalan darat dan jalan laut. Melalui kebijakan BRI inilah, Tiongkok mulai membuka kedekatan hubungan dan menyalurkan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur dengan kawasan Mekong (Myanmar, Laos, dan Kamboja), Asia Tenggara, hingga Asia Selatan.

B. Definisi Indo-Pasifik

Perubahan bahasa adalah salah satu indikator yang jelas dari perubahan politik dan faktor pendorong penggunaan frase Indo-Pasifik adalah geopolitik (Kassab, 2023). Seiring dengan pengaruh Tiongkok yang terus meluas di Laut Cina Selatan, negara-negara yang merasa terancam bereaksi dengan mengimbangnya. Indo-Pasifik menjadi sebuah konsep yang diciptakan untuk menciptakan identitas bersama di antara negara-negara Asia, dimulai dengan Jepang dan India lalu meluas ke Australia, AS, dan Taiwan (Li, 2021).

Istilah Indo-Pasifik pertama kali dijelaskan (tetapi istilah itu tidak dinyatakan secara eksplisit) dalam konteks geopolitik oleh pidato Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe yang berjudul “Pertemuan Dua Laut” (Li, 2021, 2). Sebelum itu, istilah itu digunakan oleh Karl Haushofer, seorang ahli geografi, untuk menggambarkan wilayah di antara Samudra Hindia dan Pasifik yang terkait dengan pembagian kolonial antara kekuatan barat dan Jepang. Dalam pidato yang disampaikan tahun 2007 itu, PM Abe berpidato di hadapan Parlemen India. Ia menggambarkan hubungan historis antara masyarakat Jepang dan India pada saat ini dan pada masa lalu, menceritakan kisah-kisah tentang persahabatan Swami Vivekananda dan Tenshin Okakura, intelektual anti-kolonial yang melihat budaya mereka tidak hanya unik, tetapi juga lebih unggul dari dunia barat.

Identitas Indo-Pasifik kian mengental digaungkan seiring dengan kebijakan AS mengubah nama pangkalan militer terbesarnya dari “Pacific Command” menjadi “Indo-Pacific Command” (BBC, 2018). Komando tempur ini mengawasi operasi Amerika di Asia dan memiliki sekitar 375.000 personel militer serta sipil. Perubahan nama dilakukan ketika ketegangan dengan Tiongkok menyeruak akibat upaya-upaya negeri itu memperluas aktivitas militernya di kawasan.

Indo-Pasifik memiliki definisi yang beragam, baik sebagai area geografis maupun konstruksi geopolitik. Area geografis adalah produk konstruksi manusia yang batas-batasnya ditentukan oleh tujuan strategis (Rumley & Chaturvedi, 2015). Negara mendefinisikan kawasan (*region*) untuk menentukan alokasi sumber daya, perhatian, penentuan kawan dan lawan, dan membangun kebijakan (Medcalf, 2020, 5). Status suatu negara, baik sebagai *super power*, *great power*, *middle power*, atau *lesser power*, berdampak pada konstruksi kawasannya (Medcalf, 2020, 5). AS mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang mencakup wilayah dari Pantai Barat India hingga Pantai Barat Amerika (Weaver, 2018). Pada masa itu, Presiden Barack Obama mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai *non-region* atau *liquid continuum*, yang menolak batasan geografis karena Indo-Pasifik pada dasarnya mengenai rute dan jalur laut, dan AS sebagai *super power* ingin mengakses seluruh area (Doyle & Rumley, 2019, 69).

Di sisi lain, Australia mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang mencakup bagian Timur Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, yang tersambung dengan Asia Tenggara, termasuk India, Asia Utara, dan AS (DFAT, 2017, 1). Sementara Jepang mendefinisikan Indo-Pasifik adalah kawasan yang membentang dari Asia-Pasifik, melalui Samudra Hindia, menuju Timur Tengah dan Afrika (MFAJ, 2019, 27). Pemerintah India memahami Indo-Pasifik yang mencakup Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik melalui selat-selat dan Laut China Selatan/Timur dan Laut Filipina (MDI, 2015, 18–19).

Indonesia tercatat mulai menggunakan frase Indo-Pasifik lewat pidato Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa: “Bagi Indonesia, mengingat kondisi geografisnya, arah masa depan kawasan Indo-

Pasifik merupakan kepentingan yang sangat penting” (Natalegawa, 2013). Pemaknaan terhadap Indo-Pasifik muncul dalam dokumen visi, misi, dan program aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada saat kampanye pemilihan presiden, yang mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai integrasi antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (KPU, 2014, 13). Belum adanya definisi dan pemaknaan yang jelas dalam konstruksi Indo-Pasifik bagi pemerintah Indonesia menyebabkan belum fokusnya prioritas, strategi, kebijakan, dan alokasi sumber daya ke kawasan ini.

Sebagai konstruksi geopolitik, Indo-Pasifik juga memiliki pemaknaan yang bervariasi, baik dari kalangan akademisi maupun pada visi dan kebijakan berbagai negara. Dari sisi akademisi, Indo-Pasifik kerap dilihat menggunakan pendekatan *non-realist* (liberalis) sebagai *oceanic neighbourhood* yang tidak terbatas dalam kerangka negara bangsa (Doyle & Rumley, 2019, 1). Salah satu karakter utama dari konsep Indo-Pasifik adalah signifikansi geopolitik maritim (Shekhar, 2018, 83). Indo-Pasifik merupakan superregion maritim dengan pusat geografis di Asia Tenggara (Medcalf, 2015, 2). Indo-Pasifik adalah sistem multipolar, di mana tatanan kawasan tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua kekuatan, yaitu AS dan Tiongkok, tetapi juga ditentukan oleh multiaktor dan banyak kepentingan lainnya (Medcalf, 2020, 13). Selain AS dan Tiongkok, negara-negara *middle power*, seperti Indonesia, Australia, dan Korea Selatan, juga memiliki peran penting dalam menentukan tatanan Indo-Pasifik (de Swielande, 2019). Terkait tatanan dunia, terdapat relasi dan pola interaksi antara negara-negara ini yang bukan lagi sebagai multipolar, tetapi sebagai tatanan dunia yang multipleks (Acharya, 2016). Tatanan dunia yang multipleks ini memiliki karakter banyak aktor kunci yang berhubungan satu sama lain yang didefinisikan sebagai hubungan interdependensi yang kompleks (Acharya, 2016).

C. Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik

Dalam konteks rivalitas AS dan Tiongkok, setidaknya terdapat enam aspek yang mendasari. Pertama, ekonomi khususnya persaingan ekonomi dan persaingan dagang. Kedua negara ini bersaing untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang menetapkan kebijakan perdagangan untuk melindungi industri masing-masing, tetapi juga berusaha untuk merugikan lawan. Tiongkok adalah mitra dagang utama AS, tetapi demikian berbagai masalah muncul sehubungan dengan praktik perdagangan yang tidak adil, pencurian hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan keterbatasan akses pasar (USGAO, 2024). Sementara itu, AS juga menerapkan tarif yang tinggi bagi barang-barang komoditi Tiongkok yang masuk ke wilayahnya, sedangkan Tiongkok juga membalas dengan penerapan tarif tinggi untuk barang-barang dari AS, yang bermuara pada perang dagang (CFR, 2025).

Kedua, militer yang merujuk pada dominasi militer dan keterlibatannya di kawasan Asia Pasifik. Baik AS maupun Tiongkok, keduanya saling memperkuat kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok terus membangun kekuatan militer yang menjadikannya sebagai ancaman bagi AS khususnya dengan ekspansi militer ke kawasan Laut China Selatan dan klaim teritorial di wilayah tersebut (Quinn, 2010). Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, aktivitas Tiongkok yang agresif di Laut Tiongkok Selatan dipandang sebagai ancaman serius terhadap status quo (Scobell, 2018). Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam pun memiliki klaim tumpang tindih atas pulau-pulau dan sumber daya di wilayah ini. Laut Tiongkok Selatan yang kaya akan minyak, gas alam, dan hasil perikanan (USEIA, 2024), merupakan jalur pelayaran penting dengan nilai perdagangan mencapai US\$5 triliun setiap tahun (Roberts & Bano, 2023, 22). Data lain menyebutkan bahwa 90% perdagangan dunia dikirim menggunakan jalur laut dan setengahnya melintasi atau berhenti di Laut Tiongkok Selatan (George, 2013). Hal ini membuat Laut Tiongkok Selatan bukan hanya jalur nadi

perdagangan global, tetapi juga medan pertarungan kepentingan yang terus menghangat, terutama antara AS dan Tiongkok (Hayton, 2014; Shambaugh, 2021).

Ketiga, faktor kemajuan teknologi dan inovasi. Kedua negara berkompetisi untuk menjadi pengembang teknologi canggih, seperti 5G, *artificial intelligence* (AI), hingga semikonduktor (Allison et al., 2021; Farooq, 2023; Hass et al., 2021). AS dan Tiongkok juga saling menuduh dengan praktik intelijen siber dan serangan siber, pencurian hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam dunia siber, serta membajak situs pemerintahan dan jaringan militer kedua negara (Allison et al., 2021). Presiden Xi Jinping memandang kepemimpinan teknologi global sebagai bagian penting dari misi kebangkitan nasional Tiongkok. Kemajuan teknologi tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri atau mendorong pertumbuhan ekonomi—tetapi juga sebagai cara bagi Tiongkok untuk merebut kembali statusnya sebagai kekuatan besar dunia. Para pemimpin Tiongkok melihat negara mereka tertinggal dalam tiga revolusi industri sebelumnya (mesin uap, listrik massal, dan komputer), dan kini bertekad memimpin revolusi keempat (Toner, 2023). Sejak Xi menjabat, sektor sains dan teknologi Tiongkok mencatat kemajuan pesat. Salah satu pencapaian besar terjadi pada 2016, ketika superkomputer Sunway TaihuLight—yang sepenuhnya menggunakan prosesor buatan dalam negeri—menjadi yang tercepat di dunia. Capaian penting lainnya adalah ketika Tiongkok menerbitkan lisensi penggunaan komersial 5G pada tahun 2019, teknologi komunikasi tercanggih di dunia yang diperkirakan berkontribusi \$ 1,54 triliun ke ekonomi Tiongkok dan menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan (Franedya, 2019). Tiongkok bahkan mengalahkan AS di belanja penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*) tahap lanjut dan jumlah publikasi ilmiah (Tollefson, 2018).

Keempat, politik dan ideologi khususnya perbedaan pandangan politik dan benturan ideologi. AS yang mengedepankan demokrasi bertolak belakang dengan Tiongkok yang berideologi komunis yang semakin berkembang menjadi autokrasi. Hubungan keduanya

dimulai pada tahun 1949 yang mengalami tahapan ketegangan dan juga kerja sama (CFR, 2025). Sebelum menandatangani *Shanghai Communique* antara Presiden Richard Nixon dan Premier Zhou Enlai tahun 1972, hubungan kedua negara selalu mengalami ketegangan. *Shanghai Communique* bertujuan untuk memberikan jembatan bagi AS dan Tiongkok untuk memperbaiki hubungan termasuk juga secara progresif membahas masalah yang sulit seperti Taiwan. Pada tahun 1979, AS dan Tiongkok membuka hubungan diplomatik resmi di mana pemerintah AS mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah melalui *One China Policy* (CFR, 2025). Jisi (2023) membagi fase relasi bilateral ini menjadi tiga, 1979–2008 menjadi era kerja sama erat melawan ekspansi Uni Soviet saat Perang Dingin bergulir dan puncaknya terjadi saat Presiden George W. Bush menghadiri Olimpiade Beijing tahun 2008. Periode kedua adalah tahun 2009–2018 di mana hubungan bilateral mulai berubah menjadi kompetisi strategis dan persaingan. Sementara periode ketiga adalah sejak 2019 di mana AS dan Tiongkok berpotensi masuk ke situasi konfrontasi penuh. Secara khusus, mulai tahun 2017 AS secara terbuka menyebut Tiongkok sebagai “*strategic adversary*” atau lawan strategis (Jisi & Ran, 2019, 2).

Kelima, diplomasi dan aliansi, yang merujuk pada pembentukan aliansi strategis. AS hadir sebagai sekutu negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi kekuatan Tiongkok, sedangkan Tiongkok memperluas pengaruh dan diplomasi melalui BRI. Bahkan persaingan antara keduanya telah memengaruhi jalannya berbagai lembaga internasional. Hal ini terlihat ketika pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan keluar dari institusi multilateral, seperti TPP, ketika Tiongkok justru membangun organisasi regional baru yang memberi ruang untuk ekspansi ke tatanan global (Perthes, 2021). Persaingan keduanya juga memengaruhi tatanan global pada bidang kesehatan khususnya Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) ketika AS menuduh WHO yang terlalu dekat dengan Tiongkok, sementara Tiongkok balas menuduh AS yang terlalu mempolitikasi WHO (Parmar & Furse, 2021).

Keenam, isu regional khususnya konflik regional di Taiwan dan Korea Utara. Tucker (2009) pernah menyebut konflik di Selat Taiwan sebagai ancaman paling serius bagi AS sebab berpotensi konfrontasi langsung dengan negara berkekuatan nuklir. Ketegangan di Taiwan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama sengketa wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pemerintah Beijing yang semakin agresif mengklaim wilayah lewat *Nine Dash Line*, memicu konflik dengan negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sementara itu, kebijakan *pivot to Asia* dan komitmen AS terhadap kebebasan navigasi serta perjanjian pertahanan dengan negara-negara di kawasan membuat potensi gesekan dengan Tiongkok semakin besar (Lin, 2025). Terkait kebijakan pertahanan misil AS terhadap ancaman Korea Utara justru mendorong Tiongkok memperkuat kapabilitas serangan balasan nuklirnya, sehingga memicu ketegangan berkelanjutan (Ekmektsioglou & Lee, 2022).

D. Geoekonomi dan *De-risking*

Geoekonomi memiliki beragam definisi. Blackwill dan Harris (2016, 20) menyatakan bahwa geoekonomi adalah penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional, untuk mendukung aktivitas geopolitik yang menguntungkan sehingga tujuan dan kepentingan nasional negara bisa tercapai melalui peningkatan dampak ekonomi terhadap negara lain. Bisa dikatakan bahwa geoekonomi adalah upaya negara membangun dan menggunakan kekuasaannya dengan menggunakan faktor-faktor ekonomi daripada keunggulan geografisnya (Blackwill & Harris, 2016, 24). Geoekonomi ini dapat didefinisikan menggunakan dua cara. Pertama, dampak geopolitik terhadap aktivitas ekonomi, dan kedua, dampak ekonomi terhadap penggunaan kekuasaan negara dalam konteks geopolitik (Baru, 2012, 47).

Sementara itu, geoekonomi juga bisa dikatakan sebagai kekuasaan birokrasi pemerintah yang menggunakan instrumen-instrumen ekonomi dalam membangun hubungan dengan negara lain, yang tidak lagi mengutamakan aspek kepentingan strategis dan keamanan

(Luttwak, 1993; Sparke, 1998, 63). Dalam konteks ini, geoekonomi dapat dimaknai sebagai upaya kerja sama lintas batas negara untuk berkompetisi secara global dan regional dengan menggunakan instrumen ekonomi. Pada satu sisi, geoekonomi mempermudah kerja sama antarnegara, tetapi pada sisi lain, menyebabkan peningkatan persaingan antarnegara (Sparke, 1998, 90).

Geoekonomi masuk ke dalam kebijakan luar negeri suatu negara melalui berbagai cara dan pola. Edward Luttwak (1990) menggarisbawahi bahwa dinamika politik domestik dan sistem politik suatu negara menentukan bagaimana negara ini menerapkan perilaku geopolitik atau tidak (Vihma, 2018). Setidaknya terdapat tiga cara bagaimana geoekonomi ini memengaruhi kebijakan luar negeri. Pertama, secara sistematis, faktor internasional memengaruhi dinamika politik domestik dalam konteks yang spesifik. Ketika para pembuat kebijakan menghadapi perubahan dalam lingkungan strategisnya, hal tersebut menyebabkan peningkatan atau justru penurunan dalam menyusun strategi menuju geoekonomi. Kedua, geoekonomi selalu bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan kapan suatu negara menggunakan kekuasaannya untuk menunjukkan perannya dalam pergaulan internasional maupun di lingkungan tetangganya. Ketiga, ketika geoekonomi dan geopolitik saling berkaitan secara kuat maka berbagai aspek penting dalam geoekonomi dapat menjadi unsur utama dalam geopolitik, karena penggunaan kekuasaan negara yang berbeda akan memiliki dampak yang berbeda pula (Vihma, 2018; Vihma & Wigell, 2016; Wigell & Vihma, 2016).

Oleh karena itu, geoekonomi adalah strategi dalam kebijakan luar negeri. Negara menggunakan kekuatan ekonomi untuk merealisasikan kepentingan strategis dan mengontrol wilayah strategis yang spesifik melalui pengaruh hegemoni di kawasan (Scholvin & Wigell, 2018, 74). Sebagai strategi, geoekonomi terdiri atas dua komponen. Pertama, bagaimana negara menggunakan kekuasaan dan perangkat ekonomi untuk memperkuat diplomasi dan eksistensi dalam pergaulan internasional. Kedua, bagaimana negara menjalankan diplomasi dan eksistensi untuk memperkuat kondisi ekonomi di dalam negeri (Clinton, 2011; Scholvin & Wigell, 2018, 73).

Sementara itu, semakin meningkatnya ketegangan geopolitik di suatu kawasan memunculkan kondisi baru yang dikenal dengan nama *de-risking* atau pengurangan risiko sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara-negara yang dianggap berbahaya secara geopolitik (Cave, 2023). Praktik *de-risking* telah terjadi sejak perang dagang antara AS melawan Tiongkok pada masa Presiden Donald Trump periode pertama. *De-risking* juga disampaikan oleh Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, yang menyatakan bahwa *de-risking* merupakan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam pasar domestik dan mengurangi kerentanan terhadap ketegangan geopolitik di level regional (von der Leyen, 2023).

De-risking juga diadopsi dalam pertemuan tingkat tinggi G7 di Jepang pada bulan Mei 2023 (TWH, 2023) yang menggarisbawahi bahwa negara-negara G7 perlu memiliki ketahanan ekonomi sehingga membutuhkan *de-risking* khususnya diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan kritis. *De-risking* mengedepankan logika ekonomi di mana ketika ketegangan geopolitik semakin meningkat antara AS melawan Tiongkok maka perlu menggunakan instrumen ekonomi di samping juga instrumen keamanan.

E. Keamanan Siber dan Rivalitas Negara Besar

Kemajuan teknologi informasi sering dideskripsikan sebagai pencapaian kemajuan manusia yang luar biasa. Namun demikian, ketika kemajuan teknologi informasi dilihat dari perspektif keamanan, pemahamannya menjadi sangat berbeda karena teknologi tidak hanya masalah teknis, tapi juga berkelindan dengan isu sosial dan politik. Berbagai negara yang memiliki kemajuan teknologi cenderung untuk membatasi negara lain dengan berbagai cara dengan menggunakan sistem yang paralel.

Hal ini juga terjadi pada Tiongkok dengan kemajuan teknologi informasinya memiliki karakter yang industrinya sangat dikontrol oleh pemerintah, industri juga dilindungi oleh pemerintah, mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah, mengintegrasikan antara sipil

dan militer, membatasi penggunaan produk-produk dari negara lawan, memaksakan integrasi, membangun pasar yang semakin besar, dan bahkan berbagai kesepakatan internasional melakukan standarisasi, yang membuat perusahaan telekomunikasi Tiongkok, seperti Alibaba dan Tencent, pemilik WeChat dan AliPay, menjadi dominan dalam pasar telekomunikasi domestik (Doshi & McGuinness, 2021). Berbagai perusahaan ini ketika mulai ekspansi global tidak hanya menargetkan pasar dari AS, tetapi juga pasar negara-negara berkembang dengan keuntungan lebih sedikit dan juga persaingan yang lebih rendah.

Tiongkok melalui kebijakan BRI bertujuan untuk membangun standar infrastruktur cerdas di kawasan Asia, khususnya yang berkaitan dengan perangkat lunak dan sensor, yang dikenal juga dengan *China's Digital Silk Road*. Sejak itu, Tiongkok membangun infrastruktur jaringan internet, investasi besar-besaran agar *chips* buatan Tiongkok mampu mengalahkan buatan AS dalam persaingan internet standar 5G. Hal serupa juga terjadi ketika perusahaan telekomunikasi Tiongkok, seperti Huawei dan ZTE mendapatkan pinjaman dari pemerintah untuk membangun infrastruktur di berbagai negara berkembang.

Pada awal dekade 2000-an, Tiongkok melakukan serangan terhadap jaringan internet Kementerian Pertahanan AS yang dikenal dengan nama *Operation Titan Rain*. Hal tersebut memicu berbagai negara tidak hanya AS, tetapi juga Inggris, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, mengeluhkan serangan Tiongkok atas jaringan internet pemerintahnya. Berbagai serangan siber terbesar yang pernah dilakukan Tiongkok terhadap AS juga disampaikan oleh Jaksa Agung, William Barr, yang pernah mengalami pencurian pada *US Office of Personnel Management* (USOPM) yang tercatat sebanyak 21 juta data, jaringan Hotel Marriott (400 juta), asuransi kesehatan Anthem (80 juta), dan Equifax (147 juta) (Doshi & McGuinness, 2021).

F. Kerja Sama Selatan-Selatan

Kerja Sama Selatan-Selatan adalah modalitas negara-negara yang terletak di bumi bagian selatan untuk membangun kemitraan secara horizontal mengenai berbagi informasi, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi, serta bidang keahlian, untuk mendukung pembangunan di kawasan tersebut (Rinaldi, 2023). Kerja Sama Selatan-Selatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, independensi nasional, kesetaraan, tidak mencampuri urusan politik domestik, tidak meminta persyaratan yang memberatkan, berdasarkan pada kebutuhan, dan memberikan manfaat timbal balik.

Sebagai salah satu aktor utama di kawasan Asia Pasifik, Indonesia perlu berhadapan dengan berbagai negara termasuk persaingan AS melawan Tiongkok di area tersebut. Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasionalnya dengan negara-negara Pasifik Selatan dan juga pertentangan kepentingan nasional antara dua negara besar, yaitu AS melawan Tiongkok. Hal tersebut memberikan kesempatan pada Indonesia untuk membangun kerja sama di kawasan Selatan-Selatan dari berbagai perspektif yang juga menguntungkan kepentingan nasionalnya (Hutagalung, 2024).

G. Struktur Buku

Buku bunga rampai ini mengulas Indonesia dalam kancah geopolitik di Indo-Pasifik dan *Global South* ke dalam enam bab. Di dalam pembahasan pertama, Maulana Ibrahim dan Poppy Wulandari mengajak pembaca menyelami lebih dalam peran dan pengaruh aktor-aktor utama di balik rivalitas antara AS dan Tiongkok. Bab ini menguraikan secara perinci bagaimana AS, Tiongkok, dan India menavigasi kompleksitas geopolitik kawasan ini melalui kebijakan dan strategi yang mereka gunakan. Mereka mengupas latar belakang historis rivalitas sembari memetakan pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur dan menganalisis bagaimana perubahan tersebut

membentuk tatanan ekonomi dan politik global saat ini. Inisiatif ambisius Tiongkok melalui BRI bertujuan memperluas pengaruh ekonomi melalui investasi infrastruktur dan kerja sama ekonomi di seluruh Indo-Pasifik. Selain itu, pendekatan diplomasi *soft power* oleh India akan dibahas untuk mengungkap bagaimana budaya dan pendidikan menjadi alat strategis dalam memperkuat posisi India di kawasan ini.

Amerika Serikat, melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) yang melibatkan Jepang, India, dan Australia, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut China Selatan, dengan klaim teritorial Tiongkok yang luas dan respons negara-negara, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, menjadi titik fokus utama dalam memahami dinamika rivalitas ini. Quad, sebagai forum strategis untuk keamanan maritim, berupaya menjaga kebebasan navigasi dan mencegah dominasi Tiongkok di kawasan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, pembahasan dalam bab ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana rivalitas AS-Tiongkok memengaruhi stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik. Pembaca akan dibekali dengan wawasan yang lebih tajam mengenai aktor-aktor utama dalam geopolitik kawasan yang juga membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut di bab-bab berikutnya.

Di pembahasan berikutnya, Arrizal Anugerah Jaknanihan dan Alfin Febrian Basundoro membahas tren geoekonomi di Indo-Pasifik yang berfokus kepada fenomena pengurangan risiko (*de-risking*). Integrasi dan interdependensi ekonomi telah lama menjadi fondasi utama kerja sama di Asia-Pasifik. Meskipun demikian, transformasi kawasan menjadi Indo-Pasifik memperlihatkan perubahan signifikan dalam hubungan ekonomi dan politik global. Sementara negara-negara di kawasan tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat meski terdapat tensi geopolitik dengan Tiongkok, bab ini mengeksplorasi bagaimana hubungan ekonomi yang erat justru dipandang sebagai sumber konflik geopolitik. Mengutip pidato Penasehat Keamanan

Nasional AS Jake Sullivan yang menggambarkan pergeseran besar dalam tatanan ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik, keterbukaan ekonomi ternyata tidak lagi dianggap sebagai prasyarat bagi kesejahteraan, tetapi justru sebagai sumber kerentanan.

Dalam konteks ini, AS berupaya mengurangi ketergantungan pada Tiongkok melalui strategi pengurangan risiko (*de-risking*). Pergeseran ini menantang kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang didasari strategi *hedging* untuk meningkatkan otonomi dan minimalisir risiko dengan tidak berpihak pada satu kekuatan besar. Bab ini secara kritis membedah tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia akibat tren *de-risking*, serta respons kebijakan Indonesia dalam berbagai ranah, baik bilateral maupun multilateral.

Bab ini juga menyoroti bagaimana keterbatasan Indonesia dalam mengapitalisasi tren yang ada, baik berupa masalah domestik maupun kapasitas luar negeri Indonesia. Analisis ini didasarkan pada kajian literatur yang mendalam, mencakup naskah pidato, kertas kebijakan, data statistik, serta sumber literatur primer, dan sekunder lainnya. Melalui analisis yang komprehensif, para penulis memberikan wawasan tentang implikasi geoekonomi di Indo-Pasifik dan bagaimana Indonesia dapat menavigasi tantangan dan peluang tersebut.

Pada bagian berikutnya, Paulus Rudolf Yuniarto dan Wabilia Husnah mengkaji secara mendalam persaingan strategis antara Tiongkok dan AS dalam industri nikel di Indonesia. Nikel merupakan komponen vital dalam produksi baterai lithium-ion, yang menjadi bahan utama untuk kendaraan listrik dan produk teknologi semikonduktor lainnya. Dengan meningkatnya permintaan global untuk kendaraan listrik dan kebutuhan akan baterai berkualitas tinggi, nikel menjadi komoditas yang sangat berharga. Sejak beberapa tahun terakhir, harga nikel terus meroket, dipicu oleh meningkatnya penggunaan nikel dalam industri kendaraan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, dan ketahanan energi. Tiongkok dan AS, sebagai dua negara utama yang bersaing dalam produksi dan konsumsi kendaraan listrik, kini

berlomba untuk mengamankan pasokan nikel dari Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Indonesia memegang peran strategis sebagai pemasok utama nikel bagi kedua negara ini. Presiden Joko Widodo telah secara aktif mengundang investasi dari Tiongkok dan AS untuk mengembangkan industri nikel domestik. Dalam bab ini, penulis memaparkan perbedaan kebijakan dan strategi investasi Tiongkok dan AS dalam industri nikel di Indonesia. Ketika Tiongkok melancarkan pendekatan nasionalisme sumber daya, AS menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas. Perbedaan pendekatan investasi ini memunculkan berbagai implikasi, termasuk dampak lingkungan, penggusuran mata pencaharian lokal, degradasi lingkungan, dan permasalahan sosial lainnya.

Menggunakan metode kualitatif yang bersandar kepada kajian literatur dan diskusi terpumpun dengan peneliti serta pejabat pemerintah, penulis memaparkan gambaran umum dan peran industri nikel Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sektor baterai kendaraan listrik serta nuansa rivalitas antara AS dan Tiongkok dalam investasi nikel berikut rangkaian implikasinya di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang rivalitas Tiongkok dan AS dalam industri nikel, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat menavigasi tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika ini, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi sambil meminimalkan dampak sosial dan lingkungan.

Berikutnya adalah bab yang ditulis oleh Ganjar Widhiyoga, Hasna Wijayati, dan Megah Rahmat Ramadhan. Mereka mengkaji hubungan sinergis antara *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diprakarsai oleh Tiongkok dan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan posisi geografis strategis di jalur perdagangan global, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritimnya. Visi PMD yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas politik

regional melalui ekspansi jalur perdagangan, perluasan pasar, dan keamanan maritim.

Di sisi lain, Tiongkok dengan BRI-nya, yang diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, mengusung dua jalur konektivitas global: *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road*. Melalui BRI, Tiongkok berupaya untuk meningkatkan konektivitas darat dan laut guna mendukung pertumbuhan ekonomi global. Indonesia, yang berada di jalur penting *21st Century Maritime Silk Road*, menjadi titik strategis dalam inisiatif ini. Para penulis mengevaluasi irisan antara BRI dan PMD serta bagaimana kedua konsep ini diimplementasikan dalam pembangunan *Kalimantan Industrial Park Indonesia* (KIPI). KIPI merupakan salah satu proyek besar yang mencerminkan sinergi antara BRI dan PMD. Mereka membahas bagaimana KIPI berfungsi sebagai pengejawantahan konsep konektivitas maritim dan pembangunan ekonomi yang diusung oleh kedua inisiatif tersebut.

Analisis dalam bab ini akan mencakup teori geopolitik untuk memahami pentingnya posisi geografis dalam pengambilan keputusan negara dan teori kerja sama internasional untuk mengevaluasi kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan data dan informasi yang relevan dengan perwujudan BRI dan PMD dalam proyek KIPI, serta mengevaluasi sejauh mana implementasi KIPI mendukung visi strategis kedua negara. Dengan menggali lebih dalam hubungan antara BRI dan PMD melalui studi kasus KIPI, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dampak dan implikasi dari sinergi ini terhadap pembangunan ekonomi dan maritim Indonesia. Bab ini juga memberikan wawasan tentang strategi geopolitik dan kerja sama internasional yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global.

Bahasan selanjutnya ditulis oleh Ali Abdullah Wibisono yang menelaah peran dan tantangan diplomasi siber di Asia Tenggara di tengah rivalitas geopolitik antara AS dan China di kawasan Indo-Pasifik. Ruang siber dan teknologi digital telah menjadi elemen krusial

dalam interaksi antarnegara di Indo-Pasifik, memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian digital, tetapi juga menciptakan tantangan keamanan yang kompleks. Kawasan Indo-Pasifik, yang terdiri atas 40 negara dan diproyeksikan akan mewakili lebih dari 50% GDP dunia pada tahun 2040, menjadi episentrum persaingan strategis, termasuk di ruang siber. Sementara itu, diplomasi siber didefinisikan sebagai alat penting dalam kebijakan luar negeri untuk menjaga interaksi di ruang siber agar tidak mengarah kepada konflik, dan membangun kepercayaan sebagai dasar kerja sama.

Dalam konteks ini, AS, China, dan Rusia membawa prioritas masing-masing dalam konstruksi norma keamanan siber di forum internasional, seperti *United Nations Group of Governmental Experts* (UNGGE) dan *United Nations Open-Ended Working Group* (OEWG). China menekankan kedaulatan nasional dan menghindari intervensi aktor eksternal, sementara AS cenderung mendukung kemitraan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil di bawah aturan-aturan internasional yang mengikat. Penulis mengeksplorasi sejauh mana rivalitas geopolitik AS-China di ruang siber memengaruhi keamanan siber di Asia Tenggara. Bab ini menjelaskan bagaimana persaingan antara dua kekuatan terkuat di dunia telah menjadi struktur yang membatasi upaya diplomasi siber negara-negara Asia Tenggara dan menghambat terbentuknya arsitektur norma keamanan siber yang solid di kawasan. Penulis juga mengevaluasi berbagai aspek diplomasi siber di Asia Pasifik, termasuk pembangunan norma dan arsitektur keamanan regional, serta peran diplomasi siber dalam mitigasi ketidakamanan di ruang siber yang semakin kompleks dengan inovasi, seperti kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain*. Meski demikian, belum ada riset yang secara khusus melihat implikasi dari rivalitas AS-China di ruang siber Asia Tenggara dan kesenjangan digital di antara negara-negara anggotanya.

Dalam menyusun argumen-argumennya, penulis menggunakan data dari laporan-laporan keamanan siber, indeks keamanan siber dari *Internasional Telecommunication Union* (ITU), serta kontribusi

negara-negara terhadap keamanan siber global berdasarkan indeks dari Estonian e-Governance Academy. Melalui analisis ini, pembaca akan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keamanan siber dan membangun kerja sama regional yang kokoh.

Sebagai bahasan terakhir dalam buku bunga rampai ini, Baiq Wardhani, Sarah Anabarja, dan Renatha A. Roszdiana membahas upaya Indonesia dalam mewujudkan kebijakan luar negeri *Look East* melalui diplomasi biru di wilayah Pasifik Selatan dengan menggunakan skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST). Kebijakan *Look East* merupakan strategi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan, dengan tujuan utama memperkuat kerja sama dan pembangunan bersama yang mencakup bantuan pembangunan, kerja sama sektoral, dan bantuan teknis. Dalam konteks ini, diplomasi biru menjadi instrumen penting dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kelautan, serta mendukung berbagai inisiatif ekonomi berbasis laut.

Diplomasi biru Indonesia bertujuan untuk menangkal isu kemerdekaan Papua yang disuarakan oleh negara-negara Pasifik melalui pendekatan yang holistik dan beragam, termasuk bantuan finansial, pembangunan kapasitas, dan dukungan teknis. Konsep ini belum sepenuhnya dikenal di Indonesia, tetapi makin populer di tingkat global karena kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 14. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya membangun citra positif dan memainkan peran yang lebih besar di kawasan Pasifik.

Indonesia membentuk Forum Pasifik Selatan Indonesia (ISPF) pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan di Pasifik Selatan. Diplomasi biru Indonesia di kawasan ini mencakup dimensi politik, ekonomi, dan budaya, serta bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya melalui visi *Pacific Elevation*. Dengan menyadari kepentingan yang

semakin kompleks di kawasan ini, Indonesia berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik untuk mengatasi tantangan bersama.

Negara-negara kepulauan Pasifik yang kini dikenal sebagai *large ocean island states* (LOIS) telah memperkenalkan konsep 'Pasifik Biru' sebagai identitas kolektif mereka untuk menghadapi kerentanan bersama terkait perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa negara-negara Pasifik membentuk satu kesatuan yang saling terhubung secara geografis dan budaya, dengan tantangan keamanan yang sama. Keterlibatan Indonesia dalam *Blue Pacific* menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan diplomasi dengan kepentingan negara-negara Pasifik dan memperkuat stabilitas serta kemakmuran regional.

Bab ini menjelaskan bagaimana diplomasi biru dapat memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan melalui KSST. Diplomasi biru dianggap sebagai titik awal utama untuk memperkuat identitas Indonesia di Pasifik dan meningkatkan keterlibatan dalam berbagai aspek di kawasan ini. ISPF dijadikan platform untuk kerja sama regional, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan khusus negara-negara Pasifik Selatan dan meningkatkan kolaborasi serta kemitraan. Menggunakan metode kualitatif menganalisis kebijakan *Look East* melalui diplomasi biru dan hubungannya dengan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, para penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Telaah ini dilakukan untuk memahami bagaimana diplomasi biru dan KSST dapat disinergikan dengan kebijakan *Look East*, serta tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan *Look East* dan diplomasi biru, pembaca akan memperoleh wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat memperkuat posisinya di Pasifik Selatan dan mengatasi tantangan dalam membangun kerja sama yang solid dengan negara-negara di kawasan ini.

Sebagai penutup, kami juga menuliskan epilog yang mengikat kembali benang merah dari setiap bab buku bunga rampai sambil

mengarahkan pandangan ke masa depan. Langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah memperkuat strategi diplomasi dan kebijakan luar negeri, serta berinvestasi dalam pembangunan kapasitas domestik di berbagai sektor. Keterlibatan aktif dalam forum-forum regional dan internasional juga menjadi kunci untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Mengapa ini penting? Karena di tengah persaingan geopolitik dan geoekonomi yang semakin ketat, Indonesia harus mampu menavigasi dengan cerdas dan strategis. Keterlibatan aktif dan posisi yang kuat di Indo-Pasifik dan *Global South* akan memberikan keuntungan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan yang lebih baik. Selain itu, Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk masa depan kawasan ini. Dalam epilog, kami ingin mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia dalam kancah geopolitik dan geoekonomi masih panjang. Dengan strategi yang tepat dan keterlibatan aktif dalam diplomasi, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam kancah internasional, memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan kemakmuran global.

Referensi

- Acharya, A. (2016). Security pluralism in the Asia-Pacific: Reshaping regional order. *Global Asia*, 11(1), 12–17.
- Allison, G., Klyman, K., Barbesino, K., & Yen, H. (2021, December 7). The great tech rivalry: China vs the US. *Belfer Center*. <https://www.belfercenter.org/publication/great-tech-rivalry-china-vs-us>
- Baru, S. (2012). Geo-economics and Strategy. *Survival: Global Politics and Strategy*, 54(3), 47–58. doi:10.1080/00396338.2012.690978
- BBC. (2018, May 31). US military renames Pacific Command. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44312024>
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft*. Harvard University Press.
- Brands, H., & Gaddis, J. L. (2021). The New Cold War: America, China, and the Echoes of History. *Foreign Affairs*, 100(6), 10–21.

- Cave, D. (2023, May 22). How 'decoupling' from China became 'de-risking'. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/05/20/world/decoupling-china-de-risking.html>
- CFR. (2025). 1949–2025. US-China relations. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/timeline/us-china-relations>
- Chan, L. H., & Lee, P. K. (2024). *China-US great-power rivalry: The competitive dynamics of order-building in the Indo-Pacific*. Routledge.
- Clinton, H. (2011, October 11). Remarks by Hillary Rodham Clinton, US Secretary of the State titled Economic Statecraft at the Economic Club of New York, New York City, USA [Press release]. <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/10/175552.htm>
- de Swielande, T. S. (2019). Middle powers in the Indo-Pacific: Potential pacifiers guaranteeing stability in the Indo-Pacific? *Asian Politics & Policy*, 11(2), 190–207. doi:10.1111/aspp.12457
- DFAT. (2017). *2017 Foreign policy white paper*. Department of Foreign Affairs and Trade (Australian Government).
- Dollar, D. (2025). The Limits of China's Economic Rise. In B. N. V. Steen (Ed.), *Not Just Another Cold War: The Global Implications of the US-China Rivalry* (55–74). Oxford University Press.
- Doshi, R., & McGuinness, K. (2021, March). Huawei meets history: Great powers and telecommunications risk, 1840–2021. <https://www.brookings.edu/articles/huawei-meets-history-great-powers-and-telecommunications-risk-1840-2021/>
- Doyle, T., & Rumley, D. (2019). *The rise and return of the Indo-Pacific*. Oxford University Press.
- Ekmektsioglou, E., & Lee, J.-Y. (2022). North Korea, Missile Defense, and U.S.-China security dilemma. *The Pacific Review*, 35(4), 587–616. doi:10.1080/09512748.2020.1862285
- Farooq, M. U. (2023, January 17). US-China tech rivalry: Impacts and a way forward. *Global Village Space*. <https://www.globalvillagespace.com/us-china-tech-rivalry-impacts-and-way-forward/>
- Franedya, R. (2019, June 06). Resmi! China masuki era teknologi 5G komersial. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190606122528-37-76947/resmi-china-masuki-era-teknologi-5g-komersial>

- George, R. (2013). *Ninety percent of everything: Inside shipping, the invisible industry that puts clothes on your back, gas in your car, and food on your plate*. Henry Holt and Company.
- Hass, R., Kim, P. M., Kimball, E., Brandt, J., Dollar, D., Kerry, C. F., Klein, A., Meltzer, J. P., Meserole, C., Nelson, A. J., Singh, P., Sisson, M. W., & Wright, T. (2021, December 23). *US-China technology competition. A Brookings Global China Interview*. <https://www.brookings.edu/articles/u-s-china-technology-competition/>
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The struggle for power in Asia*. Yale University Press.
- Hutagalung, S. (2024, April 25). Navigating Indonesia's relations in South Pacific For 2024 – OpEd. *Eurasia Review*. https://www.eurasiareview.com/25042024-navigating-indonesias-relations-in-south-pacific-for-2024-oped/#google_vignette
- IMF. (2025). World economic outlook (April 2025). <https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO>
- Jisi, W. (2023). From reluctant cooperation to assertive competition: China's reaction to US strategic pressure, 1979–2022. In E. S. Medeiros (Ed.), *Cold Rivals: The New Era of US-China Strategic Competition* (108–142). Georgetown University Press.
- Jisi, W., & Ran, H. (2019). From cooperative partnership to strategic competition: A review of China–U.S. relations 2009–2019. *China International Strategy Review*, 1(1), 1–10. doi:10.1007/s42533-019-00007-w
- Kassab, H. S. (2023). What is the Indo-Pacific? genealogy, securitization, and the multipolar system. *Chinese Political Science Review*, 8(4), 573–596. doi:10.1007/s41111-023-00233-z
- KPU. (2014). *Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. visi, misi dan program aksi. Joko Widodo - Jusuf Kalla 2014*. Komisi Pemilihan Umum.
- Kydd, A. (2020). Switching sides: Changing power, alliance choices and US–China–Russia Relations. *International Politics*, 57(5), 855–884. doi:10.1057/s41311-020-00225-9
- Li, H. (2021). The “Indo-Pacific”: Intellectual origins and international visions in global contexts. *Modern Intellectual History*, 19(3), 807–833. doi:10.1017/S1479244321000214

- Lin, M. (2025). Taiwan, geopolitics, and US–China relations. *The Geography Teacher*, 22(1), 31–35. doi:10.1080/19338341.2024.2432276
- Luttwak, E. (1993). The coming global war for economic power: There are no nice guys on the battlefield of geo-economics. *The International Economy*, 7(5), 18–67.
- Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geo-economics: Logic of conflict, grammar of commerce. *The National Interest*, 20, 17–23.
- MDI. (2015). *Ensuring secure areas. indian maritime security strategy*. Ministry of Defence of India (Indian Navy).
- Medcalf, R. (2015). Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific. *The Asan Forum*. <https://theasanforum.org/reimagining-asia-from-asia-pacific-to-indo-pacific/>
- Medcalf, R. (2020). Contest for the Indo-Pacific: Why China won't map the future in. LaTrobe University Press.
- MFAJ. (2019). *Diplomatic blue book 2019*. Ministry of Foreign Affairs of Japan (Japanese Government).
- Natalegawa, M. (2013, May 20). 'An Indonesian perspective on the Indo-Pacific'. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/an-indonesian-perspective-indo-pacific.html>
- Parmar, I., & Furse, T. (2021). The Trump administration, the far-right and world politics. *Globalizations*, 20(5), 799–813. doi:10.1080/14747731.2021.1991660
- Perthes, V. (2021). Dimensions of rivalry: China, the United States, and Europe. *China International Strategy Review*, 3(1), 56–65. doi:10.1007/s42533-021-00065-z
- Quinn, A. (2010, September 16). Q+A: What is causing tension between U.S. and China? *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-issues-qa/qa-what-is-causing-tension-between-u-s-and-china-idUSTRE68F3BD20100916>
- Rinaldi, P. N. (2023, August 12). The vital role of south-south cooperation and its importance for the summit of the future. *Global Governance Forum*. Retrieved from <https://globalgovernanceforum.org/vital-role-south-south-cooperation-importance-summit-of-the-future/>
- Roberts, K., & Bano, S. (2023). *The ascendancy of regional powers in contemporary US-China relations: Rethinking the great power rivalry*. Palgrave Macmillan.

- Rumley, D., & Chaturvedi, S. (2015). *Geopolitical orientations, regionalism and security in the Indian Ocean*. Routledge.
- Scholvin, S., & Wigell, M. (2018). Power politics by economic means: Geoeconomics as an analytical approach and foreign policy practice. *Comparative Strategy*, 37(1), 73–84. doi:10.1080/01495933.2018.1419729
- Scobell, A. (2018). The South China Sea and U.S.-China rivalry. *Political Science Quarterly*, 133(2), 199–224. doi:10.1002/polq.12772
- Shambaugh, D. (2021). *Where great powers meet: America & China in Southeast Asia*. Oxford University Press.
- Shekhar, V. (2018). *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st Century: Rise of An Indo-Pacific power. First Edition*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Sparke, M. (1998). From geopolitics to geoeconomics: Transnational state effects in the borderlands. *Geopolitics*, 3(2), 62–98. doi:10.1080/14650049808407619
- Steen, B. N. V. (2025). *Not just another cold war: The global implications of the US-China rivalry*. Oxford University Press.
- Tollefson, J. (2018). China declared world's largest producer of scientific articles. *Nature*, 553(7686), 390–391.
- Toner, H. (2023). From backwater to near-peer: Changing US approaches toward China as a technological competitor. In E. S. Medeiros (Ed.), *Cold Rivals: The New Era of US-China Strategic Competition* (360–386). Georgetown University Press.
- Tucker, N. B. (2009). *Strait talk: United States-Taiwan relations and the crisis with China*. Harvard University Press.
- TWH. (2023, December 06). G7 leaders' statement. *Biden White House*. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/06/g7-leaders-statement-6/>
- USEIA. (2024, March 21). Regional analysis brief: South China Sea. *Energy Information Administration*. https://www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf
- USGAO. (2024). US-China relations. *Government Accountability Office*. <https://www.gao.gov/u.s.-china-relations>

- Vihma, A. (2018). Geoeconomic analysis and the limits of critical geopolitics: A new engagement with Edward Luttwak. *Geopolitics*, 23(1), 1–21. doi:10.1080/14650045.2017.1302928
- Vihma, A., & Wigell, M. (2016). Unclear and present danger: Russia's geoeconomics and the nord stream II pipeline. *Global Affairs*, 2(4), 377–388. doi:10.1080/23340460.2016.1251073
- von der Leyen, U. (2023, March 30). Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre [Press release]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063
- Weaver, J. M. (2018). The 2017 national security strategy of the United States. *Journal of Strategic Security*, 11(1), 62–71. doi:10.5038/1944-0472.11.1.1655
- Westad, O. A. (2019). The sources of Chinese conduct: Are Washington and Beijing fighting a new cold war? *Foreign Affairs*, 98(5), 86–95.
- Wigell, M., & Vihma, A. (2016). Geopolitics versus geoeconomics: The case of Russia's geostrategy and its effects on the EU. *International Affairs*, 92(3), 605–627. doi:10.1111/1468-2346.12600